

ABSTRAK

Sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat monogami terbuka yang mengizinkan poligami dengan sejumlah persyaratan baik secara formil dan material. Namun demikian dalam prakteknya banyak ditemukan adanya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan poligami yaitu pemalsuan status perkawinan oleh salah satu atau kedua calon pasangan pelaku poligami. Pemalsuan status perkawinan tersebut merupakan persoalan hukum serius yang berimplikasi terhadap Hak keperdataan pasangan yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan dan akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami, serta alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum pemalsuan identitas dalam poligami dapat dilihat baik dari segi perdata maupun pidana. Dari segi perdata, praktik ini dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan suami istri. Tidak hanya itu, akibat hukum lainnya tidak berlaku surut pada kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Selain itu, secara administratif, perkawinan tersebut tidak diakui karena akta perkawinannya telah dicabut atau dihapus. Konsekuensi hukum atas pemalsuan identitas status perkawinan secara pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 263, 279, 280 KUHP, dan Pasal 94 UU Nomor 24 Tahun 2013. Maka dari itu dibutuhkan pencegahan supaya pelanggaran tersebut tidak terulang kembali yaitu dengan memberikan pencegahan yang bersifat preventif yaitu melakukan pengecekan yang lebih teliti dan pengawasan yang super ketat. Sementara itu, juga terdapat pencegahan yang bersifat represif yaitu dengan cara penegakan hukum dan pemberian sanksi yang ketat terhadap pelaku pemalsuan identitas tersebut.

Kata Kunci : *Perkawinan Poligami, pemalsuan identitas, akibat hukum.*

ABSTRACT

The marriage legal system in Indonesia is of an open monogamous nature, allowing polygamy with a set of formal and material requirements. However, in practice, numerous violations and illegal actions in the implementation of polygamy are often found, such as the falsification of marital status by one or both prospective partners involved in polygamy. Falsifying marital status is a serious legal issue that has implications for the legal rights of the parties involved.

This study aims to determine the enforcement and legal consequences of identity falsification in polygamous marriages, as well as alternative measures to prevent identity falsification in polygamous marriages.

The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification that examines secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials used for qualitative analysis.

The research findings indicate that the legal consequences of identity falsification in polygamy can be observed in both civil and criminal aspects. In civil terms, this practice can result in the annulment of marriage, leading to the dissolution of the marital relationship. Additionally, other legal consequences do not retroactively apply to the positions of children, shared assets, and third parties. Furthermore, administratively, the marriage is not recognized because the marriage certificate has been revoked or deleted. The legal consequences of identity falsification in terms of criminal law will result in legal consequences in the form of criminal sanctions as stipulated in Article 263, 279, and 280 of the Criminal Code. Therefore, prevention is necessary to avoid a recurrence of such violations. This can be achieved through preventive measures, such as thorough checks and strict supervision. Additionally, there are also repressive prevention measures, including law enforcement and strict sanctions against those who falsify identities.

Keywords: *Polygamous Marriage, Identity Falsification, Legal Consequences.*